

## SINKRONIASASI RENCANA KERJA POKJA DAN FORUM PKP KOTA MATARAM

Hari ini, Rabu (07/07/2021) bertempat di aula rapat Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Mataram telah dilaksanakan rapat koordinasi pembahasan program kegiatan Pokja PKP dan Forum PKP Kota Mataram. Kegiatan ini diinisiasi oleh Ketua Pokja PKP Lalu Agus Supriyadi dengan dihadiri oleh perwakilan anggota Pokja, Ketua Forum PKP Abd. Rahman, wakil ketua dan sekretaris Forum PKP, Sekretaris Dinas Perkim, perwakilan dari BPPW NTB, dan tim Kotaku Mataram. Adapun agenda pertemuan pada hari ini adalah menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sebelumnya agar terjadi sinkronisasi rencana kerja Pokja PKP dengan Forum PKP.



Dari rencana kerja yang pernah disusun oleh Pokja PKP dan Forum PKP, pimpinan pertemuan Lalu Agus Supriyadi menekankan kembali tugas dan fungsi Pokja PKP dan Forum PKP yaitu melakukan mediasi kebutuhan program masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dimulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Tak lupa Lalu Agus Supriyadi mengingatkan pentingnya

sumber data yang akurat dan *up to date* dalam bentuk *big data* terpadu. “program apapun yang akan dilaksanakan, tanpa adanya *big data* terpadu yang *ter update*, tak mungkin kita bisa mengusulkan dan mengajukannya, baik di tingkat Pemda lebih-lebih program dari pusat, maka hal pertama yang menjadi perhatian bagi Pokja PKP dan Forum PKP adalah menyiapkan *big data* terpadu tersebut dan kami berkomitmen akan menyiapkannya hingga akhir tahun 2021 ini” pungkasnya. Disamping itu kebutuhan data backlog perumahan yang sampai saat ini belum dilakukan pendataan terpadu juga akan menjadi perhatian khusus dari Pokja PKP maupun Forum PKP untuk dilaksanakan melalui rencana kerjanya.

Di kesempatan lain Ketua Forum PKP, Abd. Rahman yang juga merupakan ketua Komisi III DPRD Kota Mataram mengharapkan rencana kerja yang telah disusun bersama dapat dijadikan sebagai kerangka kerja oleh Pokja PKP maupun Forum PKP. Hal mendasar yang disampaikan oleh Abd. Rahman adalah bahwa kebutuhan akan big data menjadi keniscayaan dan disinilah peran dari Forum PKP untuk menyiapkannya. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Pokja PKP, bahwa target akhir tahun

2021 adalah menyiapkan dan menyajikan data terpadu yang bisa diakses siapa pun dalam rangka menjalankan program khususnya perumahan dan kawasan permukiman. Tak lupa Abd. Rahman juga menyinggung rencana kerja Pokja PKP dan Forum PKP yang telah disusun agar dapat ditindaklanjuti. "Rencana yang paling dekat adalah melakukan peninjauan lokasi DAK Terintegrasi yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Mataram, memastikan



komunikasi dengan pemilik lahan yang ditinggali oleh warga secara ilegal di Kelurahan Bintaro agar sesegera mungkin *clean and clear*, menyelenggarakan rapat rutin di sekretariat Forum PKP yang sedang disiapkan dan menyiapkan program selanjutnya yang tertuang dalam rencana kerja, itu fokus utama Forum PKP saat ini" timpal Abd. Rahman.

Diskusi dalam pertemuan tersebut berlangsung hangat, banyak informasi dan masukan yang dituangkan dalam rekomendasi hasil rapat koordinasi. Dari Korkot Kotaku Hartatik mendorong agar Pokja PKP dan Forum PKP segera melakukan pendataan warga terdampak di lokasi kegiatan DAK Terintegrasi, menjalin komunikasi dengan pemilik lahan dan Pokja PKP segera menyusun jadwal peninjauan lokasi. Tanggapan dari perwakilan BPPW NTB disampaikan oleh Heru Wahyono yang mengapresiasi begitu aktifnya Pokja PKP dan Forum PKP Mataram setelah terbentuk, dengan didukung



oleh Rencana Kerja yang telah disusun, maka BPPW NTB mendukung dan tetap melakukan pendampingan dalam menjalankan rencana kerja Pokja dan Forum PKP. Tentunya peran aktif dan keberfungsian Pokja PKP dan Forum PKP Kota Mataram juga sangat menentukan untuk bisa terlaksananya program yang telah disiapkan. Disamping itu, BPPW NTB juga akan berkoordinasi dengan Pokja PKP untuk menyusun jadwal rencana kunjungan lapang untuk meninjau rencana lokasi

untuk pembangunan Rusunawa Kawasan, baik itu di Monjok (Kawasan Pasca Bencana), Dasan Agung (Kawasan DAS Jangkok) maupun Kawasan Pesisir Bintaro menjadi kawasan terpadu penataan kawasan kumuh disamping program DAK Terintegrasi.

Dari hasil diskusi dan pembahasan secara menyeluruh, dapat ditarik rekomendasi pertemuan ini, yaitu :

1. Penyiapan program pendataan *big data* terpadu, mulai dari pendataan perumahan dan permukiman di lokasi DAK Terintegrasi maupun kawasan lainnya, ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2021.
2. Melakukan penjadwalan ulang untuk melakukan komunikasi intens dengan pemilik lahan yang saat ini ditinggali oleh warga di lokasi rencana kegiatan DAK Terintegrasi dengan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan dan aparat lingkungan setempat.
3. Menyusun dan menyiapkan jadwal rencana kunjungan lapang ke lokasi Kawasan DAK Terintegrasi untuk memastikan konsep perencanaan dan memastikan data warga terdampak di seputar lokasi rencana kegiatan.
4. Menyusun jadwal rencana kunjungan lapang untuk meninjau rencana lokasi untuk pembangunan Rusunawa Kawasan, baik itu di Monjok (Kawasan Pasca Bencana), Dasan Agung (Kawasan DAS Jangkok) maupun kegiatan Kotaku yang akan dilaksanakan pada tahun ini, yaitu kegiatan skala kawasan pasca bencana dan kegiatan hibah DFAT melalui program Kotaku.
5. Memaksimalkan fungsi kesekretariatan Forum PKP serta mengusulkan tenaga ahli yang diperbantukan untuk menjalankan fungsi perencanaan dan pengolahan manajemen data di sekretariat Forum PKP.

Penulis : Rizal Nopiandi, ST

Jabatan/Posisi : Askot Safeguard

Tim Korkot : Cluster-1 Mataram